

Putri. A.D, Novaria. R, Murti. I (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Bernah De Valle di Desa Kembangbelor Kabupaten Mojokerto. *Prediksi Vol. 22(2). 93-101*

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Bernah De Valle di Desa Kembangbelor Kabupaten Mojokerto

Alvianty Diana Putri^{1*}, Rachmawati Novaria², Indah Murti³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ¹dianputrio75@gmail.com, ²nova@untag-sby.ac.id, ³endah@untag-sby.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

05 Mei 2023

Received in revised form:

20 Mei 2023

Accepted:

15 Juni 2023

Keyword:

Role, Local Government, Development, Tourism.

Kata Kunci:

Peran, Pemerintah Daerah, Pengembangan, Pariwisata.

ABSTRACT

Regional autonomy plays a very important role in the development of domestic tourism. There are several actors who play an important role in the development of this public sector. To advance the tourism industry in each region, community governments and investors are actors who play a role in the development of the tourism industry. This shows that local governments have a significant role in developing tourism potential. According to Pitana and Gayatri, local government has a role as a motivator, facilitator, and administrator. This research used a qualitative method with a descriptive type and the data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The research results obtained show that the role of the local government in the development of the Bernah De Valle tourist attraction has been running but is still not optimal in carrying out its role as a facilitator and dynamicator. It was also found that the inhibiting factor for the development of this tourist attraction lies in the lack of service provision to visitors due to the influence of the low quality of human resources.

ABSTRAK

Otonoomi daerah sangat penting perannya dalam pembangunan pariwisata dalam Negeri. Ada beberapa aktor yang berperan penting dalam pembangunan sector public ini. Untuk memajukan industry pariwisata di setiap wilayah, pemerintah masyarakat dan investor merupakan actor yang berperan dalam pengembangan industry pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan potensi pariwisata. Menurut Pitana dan Gayatri pemerintah daerah memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, dan dinasmitator. Penelitian inu menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif dan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata *Bernah De Valle* sudah berjalan namun masih belum optimal dalam melakukan perannya sebgaaai fasilitator, dan dinamistator. Ditemukan juga faktor pengahambat pengembangan objek wisata ini terletak pada yaitu kurangnya pemberian layanan kepada pengunjung karena pengaruh kualitas SDM yang masih rendah.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: dianputrio75@gmail.com

PENDAHULUAN

Pariwisata yang ada di Indonesia telah tersebar dipenjurus daerah dari Sabang sampai Merauke. Baik dari wisata yang berbasis alam sampai wisata budaya yang menarik. Dengan pengelolaan yang tepat dari banyaknya destinasi wisata tersedia di Indonesia, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat jika destinasi wisata dikelola secara optimal. Salah satu penggerak utama penerimaan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik berasal dari sektor pariwisata. Pariwisata sangat mudah untuk dikembangkan dengan cara meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana, keamanan dan pengelolaan yang baik agar wisatawan local maupun mancanegara dapat berkunjung dengan penuh kepuasan dan kenyamanan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, menjelaskan bahwa: Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah Daerah.

Otonomi daerah sangat penting perannya dalam pembangunan pariwisata dalam negeri melalui otonomi daerah, pemimpin daerah dapat mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada, baik dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia, untuk meningkatkan potensi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pelaksanaan otonomi daerah yang menetapkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus daerahnya. Dimana dalam hal ini, pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terbagi dalam beberapa unsur yang meliputi unsur staf, unsur pelaksana, serta unsur penunjang. Pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan ke suatu daerah diwadahi sebagai Dinas merupakan organisasi perangkat daerah yang mengatur urusan pemerintah daerah di wilayah administratif, yang dimana dalam hal ini Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab terhadap urusan pariwisata pada setiap daerah. (Prihastuti, 2022) mendefinisikan bahwa otonomi daerah ialah suatu proses desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan daerah, menciptakan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat proses demokrasi. Diharapkan adanya otonomi daerah ini, dapat melaksanakan peranan pemerintah daerah dalam membuka suatu kesempatan untuk meningkatkan kualitas daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan dengan melakukan suatu indentifikasi serta mengelola potensi sumber daya yang ada disuatu wilayah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Wana wisata Bernah De Vallei ditetapkan menjadi suatu objek wisata yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar dan telah diresmikan oleh Wakil Bupati Mojokerto pada akhir tahun 2020 dengan memiliki daya tarik panorama alam serta buatan yang cukup indah. Pada Tahun 2021 Bernah De Vallei menari 89.569 pengunjung, terutama dari masyarakat Jawa Timur. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah pengunjung turun menjadi 44.275. Dalam pengembangan wana wisata Bernah De Vallei ditemukan kekurangan dikarenakan kurangnya dukungan oleh pemerintah setempat. Dimana dalam hal ini objek wisata ini masih dirasa membutuhkan perbaikan dan pengembangan karena minimnya fasilitas pendukung.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2019 Kabupaten Mojokerto mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2018-2033, bahwa rencana induk yang termuat dalam pasal 2 dimana pembangunan kepariwisataan kabupaten diantaranya meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata dan pembangunan industri pariwisata. Oleh karena itu pemerintah wajib untuk menjaga, merawat dan

memperhatikan kelestarian daerah wisata melalui intansi daerah yang telah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten yang ditugaskan untuk menangani permasalahan transportasi.

Segala kendala seperti jarak dan waktu dalam proses perpindahan tidak lagi menjadi permasalahan mengenai bidang pariwisata di daerah tersebut, pernyataan ini didukung dengan perencanaan kinerja intansi yang termuat dalam rencana startegi organisasi perangkat daerah mengenai pariwisata dengan tujuan dan sasaran starteginya meliputi meningkatnya jumlah pengunjung serta menigkatnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Mojokerto.

Dimana dari pernyataan tersebut dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah dapat menjadi motivator, fasilitator, sekaligus sebagai dinamistator dalam pengembangan destinasi wisata sehingga pengembangan pariwisata dapat mencapai semua tujuan. Dengan harapan bahwa kegiatan pariwisata dapat terus berkembang sesuai tiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang hal-hal yang diteliti yaitu mengenai peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata Bernah De Vallei yang terletak di Kabupaten Mojokerto. Tujuannya yaitu mememaparkan fakta, kesadaran, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi sselama proses penelitian. Fokus penelitian ini adalah membatasi penelitian dengan memilih data yang relevan. (Moleong, 2014). Penelitian ini berfokus pada teori Pitana dan Gayatri (2005) tentang peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamistator. Dalam penelitian ini, wawancara, observaasi dan dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data , penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa kembangbelor merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Desa kembangbelor dikenal dengan sebutan desa "Jubel", karena setelah desa itu tidak ada desa lagi. Adanya potensi alam yang indah, menjadikan Desa Kembangbelor menjadi salah satu desa yang yang memiliki objek wisata dengan pemandangan alam yang indah. Objek wisata yang ada di Desa Kembangbelor yaitu Bernah De Vallei yang memiliki arti lembah yang berdekatan dengan sungai. Objek wisata diresmikan pada akhir tahun 2020 yang tepatnya pada tanggal 28 Desember 2020 dan berlokasi di Jl. Raya Tirtowening, Paras, Kembangbelor.

Sejak berangsurnya pandemi di Indonesia keadaan pariwisata mulai pulih dengan banyaknya kunjungan wisatawan yang mulai berkunjung ke destinasi wisata yang tersebar di Kabupaten Mojokerto. Salah satunya yaitu di objek wisata Bernah De Vallei. Pengunjung yang datang di objek wisata ini mayoritas merupakan pengunjung dosmetik yang tinggal di Jawa Timur. Berdasarkan data kunjungan wisatawan yang diperoleh peneliti dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto, maka berikut data informasi mengenai jumlah wisatawan yang telah berkunjung ke Bernah De Vallei dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Jumlah Wisatawan yang Berkunjung di Bernah De Vallei Tahun 2022-2023

Bulan	Tahun	Jumlah
Januari	2022	4.324
Februari	2022	2.265
Maret	2022	2.296
April	2022	19
Mei	2022	7.661
Juni	2022	4.953
Juli	2022	6.493
Agustus	2022	2.882
September	2022	3.457
Oktober	2022	3.482
November	2022	2.249
Desember	2022	4.194
Januari	2023	4.029
Februari	2023	2.281
Maret	2023	2
April	2023	2.939

Sumber: Disbudporapar Kab. Mojokerto Tahun 2023

Dari tabel diatas menunjukkan total jumlah pengunjung pada tahun 2022 berjumlah 44.275 wisatawan/pengunjung, serta pada tahun 2023 sampai bulan April berjumlah 9.251 wisatawan diman apada bulan Arp 2022 dan Maret 2023 mengalami penurunan dikarenakan pada bulan Ramadhan objek wisata ini tutup total. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke area destinasi tujuan wisata mengalami ketidaksatabilan tiap bulannya, yang dimana jumlah pengunjung terkadang mengalami kenaikan serta penurunan yang signifikan.

Pengembangan sektor pariwisata tidak bisa luput akan tumbuhnya pengembangan usaha akomodasi di wilayah sekitar destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto. Akomodasi dalam sektor pariwisata memeiliki andil karena akan dibutuhkan oleh wisatawan yang hendak berkunjung ke destinasi wisata, mengingat bahwa wisatawan yang hendak berkunjung ke destinasi wisata datang dari berbagai asal daerah. Dalam hal ini, peneliti akan menunjukkan data jumlah hotel maupun homestay yang ada di sekitar Kecamatan Pacet.

Tabel 1.2 Jumlah Penginapan di Kecamatan Pacet

No	Lokasi	Jumlah Hotel	Jumlah Homestay
1	Desa Petak	1	-
2	Desa Pacet	2	-
3	Desa Kembangbelor	-	4
	Jumlah	3	4

Sumber: Disbudporapar Kab. Mojokerto dan Jadesta Kembangbelor 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kecamatan Pacet yang khususnya Desa Kembangbelor terdapat tempat penginapan yang cukup memadai bagi wisatawan yang hendak berkunjung. Disisi lain, hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran dari masyarakat sekitar untuk mendukung pelaksanaan pengembangan destinasi wisata di daerah Kecamatan Pacet khususnya di Desa Kembangbelor.

Selain telah adanya hotel ataupun homestay, usaha tempat makan dan minum atau rumah makan menjadi akomodasi utama dalam pengembangan destinasi wisata karena hal itu sangat dibutuhkan dan merupakan kebutuhan utama bagi wisawatawan. Dari data pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto telah tersedia beberapa usaha rumah makan di daerah Kecamatan Pacet sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Rumah Makan di Kecamatan Pacet

No	Lokasi	Jumlah Rumah Makan
1	Desa Made	3
2	Desa Susuk	1
3	Desa Padusan	3
4	Desa Cembor	1
5	Desa Warugung	1
6	Desa Pacet	1
	Jumlah	10

Sumber: Disbudporapar Kab. Mojokerto 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah rumah makan yang ada di Kecamatan Pacet dirasa masih kurang mendukung pengembangan wisata di Kabupaten Mojokerto khususnya untuk pengembangan objek wisata Bernah De Vallei yang dimana objek wisata ini berada di Desa Kembangbelor. Hal ini diharapkan dapat bertambah bila ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat khususnya di Desa Kembangbelor mengenai pentingnya usaha tersebut sebagai salah satu sarana untuk mendukung pengembangan objek wisata *Bernah De Vallei*. Lebih lanjut, *amenity* atau fasilitas pendukung yang ada di objek wisata *Bernah De Vallei* seperti ATM, shovenir shop, serta posko tangguh bencana yang masih belum tersedia disekitar wilayah *Bernah De Vallei*.

Berdasarkan pembagian data yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti memperoleh data dari Kepala Seksi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, masyarakat Desa Kembangbelor, pengelola dan pengunjung objek wisata *Bernah De Vallei* sebagai berikut:

Motivator

Indikator motivator melihat bagaimana peran Disbudporapar Kabupaten Mojokerto terhadap pengembangan objek wisata *Bernah De Vallei*. Dalam hal ini sebagai motivator diharapkan pemerintah daerah dapat berperan dalam menggerakkan masyarakat sekitar wilayah *Bernah De Vallei* sebagai desa wisata dengan memberikan suatu bentuk pelatihan dan pendampingan, serta sosialisasi terkait pengembangan destinasi wisata.

Pelatihan Desa Wisata

Pada tahap ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan objek wisata *Bernah De Vallei* sekarang? Menurut Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari hasil wawancara 3 Mei 2023 menyatakan bahwa:

" Untuk wisata Bernah De Vallei itu sebetulnya merupakan salah satu bentuk dari desa wisata, dan sejauh ini peran dinas untuk pengembangan objek wisata Bernah De Vallei lebih kearah sebagai pembina. Jadi, untuk diranah pengelkolaan kami tidak ikut campur karena wisata tersebut sudah dikelola sendiri oleh desa dan juga perhutani. Maka dari itu, kami sejauh ini masih bersifat monitoring dan memberi pelatihan. "Kita dibidang pariwisata ada 2 poin yang kita masukan yaitu tentang pengelolaan wisata dan ekonomi kreatif. Fokus utama kita dari tahun kemarin yaitu untuk desa wisata pada bulan Maret kemarin kami menyelenggarakan workshop pembuatan konten kreatif."

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa dinas telah memberikan pelatihan kepada pihak pengelola dan masyarakat yang bekerja di objek wsiata tersebut. Bentuk pelatihan yang diberikan masih bersifat general dnegan 2 sistem yaitu yang bersertifikasi dan tidak. Namun, sampai detik ini pihak pemerintah daerah masih memberikan pelatihan desa wisata melalui pembuatann konten atau branding wisata desa.

Promosi Objek Wisata Bernah De Vallei

Melalui wawancara dengan narasumber membahas mengenai indikator fasilitator peneliti juga menanyakan mengenai medi promosi yang digunakan oleh Dinas terkait pengembangan objek wisata *Bernah De Vallei* Menurut Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa:

"Jadi kami itu punya youtube namun jarang aktif, jadi lebih ke instagram miliki Disbudporapar. Selain itu, namun juga sedang mengupdate terus melalui website tentang pariwisata miliki kami yaiu 'Sri Gitarja' yang merupakan sistem informasi digital pariwisata kabupaten mojokerto sebagai sarana promosi pariwisata yang dikelola oleh Disbudporapar Kabupaten Mojokerto."

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa peran pemerintah darah dalam mempromosikan objek wsiata Bernah De Vallei masih terbatas. Hal ini dikarenakan pihak dinas

hanya menggunakan situs web milik Disbudporapar Kabupaten Mojokerto dalam mempromosikan objek wisata ini.

Dinamistator

Indikator dinamistator, membahas mengenai apakah ada kerjasama yang telah dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Maka dari itu peneliti mengajukan pertanyaan mengenai proses kerjasama yang dilakukan dengan beberapa pihak dalam pengembang objek wisata Bernah De Vallei. berikut jawaban oleh kepala seksi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif bidang pariwisata Disbudporapar Kabupaten Mojokerto:

"Jadi objek wisata ini bekerjasama dengan pihak perhutani sebagai pemilik lahan dan POKDARWIS yang membentuk CV dimana masyarakat asli Desa Kembangbelor berinvestasi dengan menanam saham. Dengan bentuk kerjasama kontra swakelola jadi sewa lokasi aja tapi dikelola sendiri oleh masyarakat dan sharing profit."

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam pengembangan objek wisata ini pihak pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dengan pihak perhutani dan masyarakat desa yang dimana pihak perhutani sebagai pemilik lahan dan masyarakat desa yang membentuk sebuah CV dengan melakukan kerjasama secara swakelola dan sharing profit. Sedangkan, dari pihak swasta seperti agen biro travel masih belum dilakukan Kerjasama demi mendukung pengembangan wisata ini.

Pembahasan

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai Motivator

Indikator pertama menurut Pitana dan Gayatri (2005) ialah peran pemerintah daerah sebagai motivator. Indikator motivator menjelaskan sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Sehingga investor, masyarakat, serta pengusaha dibidang masyarakat Melalui data yang diperoleh oleh peneliti dari beberapa narasumber baik dari pihak Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, peran pemerintah daerah sebagai motivator sudah berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat juga sudah mulai mengerti tentang desa wisata dan walaupun masih membutuhkan pelatihan mengenai sapa pesona disebuah destinasi wisata karena belum adanya pelatihan mengenai cara pemberian pelayanan yang baik kepada pengunjung wisata.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai Fasilitator

Indikator yang kedua menurut Pitana dan Gayatri (2005) ialah peran pemerintah daerah sebagai fasilitator. Berdasarkan perannya sebagai fasilitator, dalam hal ini merujuk pada peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang mendukung program yang diadakan. Berdasarkan hasil analisis, upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung untuk mendorong minat wisatawan berkunjung masih belum maksimal dikarenakan tidak adanya bantuan secara finansial maupun fisik dikarenakan Disbudporapar membutuhkan kerjasama dengan dinas-dinas lain terkait pengembangan akses fasilitas yang ada seperti gazebo untuk tempat berteduh serta akses menuju objek wisata Bernah De Vallei seperti plakat jalan resmi menuju objek wisata tersebut.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai Dinamistator

Indikator yang terakhir menurut Pitana dan Gayatri (2005) ialah peran pemerintah daerah sebagai *dinamistator*. Berdasarkan perannya sebagai *dinamistator*, demi keberlanjutan pembangunan yang ideal, oleh karena itu baik sektor pemerintah, swasta dan masyarakat harus

dapat bekerja sama secara sinergis sebagai salah satu pelaku utama dalam pembangunan serta pengembangan pariwisata, pemerintah daerah berperan dalam mensinergikan ketiga pihak tersebut untuk perkembangan pariwisata. Berdasarkan hasil analisa, adapun bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu bekerjasama dengan pihak Perhutani sebagai pemilik lahan objek wisata yang dimana dalam hal ini pengelola menyewa lahan milik Perhutani dan melakukan sharing profit. Dari masyarakat juga membentuk suatu CV dimana yang membeli saham tersebut harus penduduk asli Desa Kembangbelor. Sehingga, dalam pengelolaannya ini berbasis masyarakat karena banyak masyarakat desa yang terlibat untuk bekerja di objek wisata *Bernah De Vallei*. Sedangkan untuk sektor swasta, narasumber memberi penjelasan bahwa masih belum ada dari sektor swasta yang membantu pengembangan objek wisata *Bernah De Vallei*.

Faktor Penghambat Pengembangan Objek Wisata *Bernah De Vallei*

Berdasarkan hasil perolehan data yang diperoleh peneliti dari pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Mojokerto, menunjukkan adanya faktor penghambat pengembangan objek wisata. Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat yaitu pada indikator *fasilitator* dan *Dinamistator*. Hal itu dibuktikan dengan dari hasil penyajian data yang telah dilakukan dan dianalisa di dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto masih belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai *fasilitator* dan *Dinamistator*. Dari segi *fasilitator*, hal ini karena tidak adanya bantuan secara fisik maupun finansial dari pemerintah daerah untuk pengembangan objek wisata *Bernah De Vallei* seperti gazebo dan perawatan mengenai fasilitas yang ada didalam mayoritas dari pihak pengelola dan masyarakat yang bekerja. Selain itu, media promosi yang digunakan lebih cenderung menggunakan website situs resmi milik Disbudporapar Kabupaten Mojokerto dan bukan media sosial yang trend dikalangan masyarakat. Sedangkan untuk *dinamistator*, pemerintah belum bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah lintas sektor seperti Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam pemberian pelatihan UMKM tentang produk wisata seperti cinderamata, souvenir (*handycraft*), produk olahan pangan yang berorientasi pariwisata disekitar objek wisata *Bernah De Vallei*. selain itu, belum dilakukan kerjasama dengan pihak swasta seperti agen biro dalam dalam pengembangan wisata *Bernah De Vallei*.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Bernah De Vallei di Desa Kembangbelor, Kabupaten Mojokerto dari ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa dai setiap idikator teori Pitana dan Gayatri (2005) sudah dijalankan walau masih belum optimal. Melalui hasil analisis yang dilakuka peneliti, ditemukan bahwa indikator yang belum maksimal yaitu terdapat pada peran pemerintah daerah sebagai *fasiliatator* dan *dinamistator*.

1. Sebagai *motivator*, pemerintah daerah sudah melakukan perannya dengan cukup baik yaitu dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara sertifikasi kepada masyarakat yang bekerja tentang cara penolongan orang.
2. Dalam hal *fasilitator*, pemerintah daerah dianggap masih belum memaksimalkan promosi serta pemeliharaan dan peningkatan fasilitas yang ada di wisata *Bernah De Vallei*. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa media promosi yang

digunakan masih terbatas yaitu hanya melalui website resmi milik Disbudporpar yang aktif dipakai pemerintah daerah dalam mempromosikan objek wisata *Bernah De Vallei* yang terletak di Desa Kembangbelor Kabupaten Mojokerto, sedangkan pembuatan konten untuk media sosial seperti *instagram, facebook, youtube dan tiktok* masih dikelola oleh pihak pengelola *Bernah De Vallei*.

3. Peran pemerintah sebagai *dinamistator* juga belum berjalan secara optimal dalam pengembangan objek wisata *Bernah De Vallei* karena masih belum melakukan kerjasama dengan beberapa pihak.
4. Faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata *Bernah De Vallei* yaitu pada faktor alam seperti saat sedang musim hujan masyarakat banyak mengeluhkan kurangnya gazebo sebagai tempat berteduh kurangnya pemberian materi mengenai sapta pesona dalam pengembangan objek wisata, yang dalam hal ini meliputi keindahan, keamanan, kesejukan, kebersihan, keramahan, dan kenangan. Sehingga, dalam pemberian service kepada masyarakat masih kurang karena pengaruh dari kualitas SDM yang masih rendah.

Saran

1. Sebagai *motivator*, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Praiwisata Kabupaten Mojokerto memberikan pelatihan mengenai sapta pesona yang dibutuhkan oleh pengelola dan masyarakat yang bekerja disana. Lebih lanjut untuk masyarakat desa bisa diberikan pelatihan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan UMKM bagi masyarakat sekitar agar hasil olah kebun agar dapat diolah dan dijadikan cinderamata yang berorientasi pariwisata sehingga sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Sebagai *fasilitator*, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Praiwisata Kabupaten Mojokerto harus lebih memperhatikan pengembangan dan perawatan fasilitas yang tersedia di objek wisata *Bernah De Vallei* seperti pemberian bantuan mengenai peningkatan fasilitas pembuatan gazebo sebagai tempat berteduh dan pembangunan toilet secara merata di beberapa titik area di objek wisata serta perawatannya. Selain itu, dalam mempromosikan wisata ini lebih aktif lagi untuk membuat konten konten yang disajikan di media sosial.
3. Sebagai *dinamistator*, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Praiwisata Kabupaten Mojokerto harus bisa melakukan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lintas sector dan pihak swasta dalam mempromosikan objek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- I Gede Pitana., & Putu G, G.(2005). Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Moleong, J. L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Kabupaten Mojokerto, (2019).
- Prihastuti, D. (2022). Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonom Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Legislasi Indonesia, 29–41.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2014).